

**MOTIVASI AMERIKA SERIKAT MEMBERIKAN BANTUAN MILITER  
KEPADA KAMBOJA TAHUN 2010-2012 (STUDI KASUS: TERORISME  
KHMER ROUGE)**

**Randi Fransisco Simanjuntak  
Syafri Harto**

**([randyfransisco@rocketmail.com](mailto:randyfransisco@rocketmail.com))**

**Cp. 087895546261**

***Abstract***

*This research describes the motivation of United States give economic n military support for Cambodia since 2010-2012 (study case: Terorisme of Khmer Rouge). This conflict start began in 1961 when Pol Pot became a leader of Khmer Rouge. This conflict about worried of United States about the develop of comunisme movement in Cambodia that can threat the democracation in Cambodia.*

*The writer collects data from books, encyclopedia, journal, mass media and websites to analyze the motivation of United States give military support for Cambodia since 2010-2012 (study case: Terorisme of Khmer Rouge). The theories applied in this research are foregin policy decision theory from Graham T. Allison and national interest concept from Donald. E. Nuchterlain.*

*The research shows that motivation of United States give military support for Cambodia are because the Khmer Rouge in Cambodia that want to move the ideology in Cambodia from democracation to be comunisme. United States make a policy are use the economic and military approach to stopped the Khmer Rouge movements in Cambodia.*

***Key words:*** *motivation, policy and terorisme.*

## **Pendahuluan**

Penelitian ini merupakan sebuah kajian diplomasi dan keamanan yang menganalisis Motivasi Amerika Serikat Memberikan Bantuan Ekonomi dan Militer Kepada Kamboja tahun 2010-2012 (Studi Kasus Terorisme Khmer Rouge).

Teknik penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*). Pada metode ini, data-data yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas merupakan data-data sekunder yang didapatkan dari buku-buku., majalah-majalah, jurnl, surat kabar, bulletin, laporan tahunan dan sumber-sumber lainnya. Peneliti juga menggunakan sarana internet dalam proses pengumpulan data yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas.

Dalam rangka memberikan fokus yang lebih tajam terhadap permasalahan yang dibahas, maka peneliti merasa perlu untuk memberikan batasan waktu dalam penelitian ini. Adapun rentang waktu yang akan peneliti maksud adalah antara tahun 2000-2012 pada masa meningkatnya kegiatan terorisme di wilayah Asia Tenggara. Tahun 2000 dipilih karena pada saat itu merupakan awal pergerakan kembali gerakan Khmer Rouge di Kamboja yang berlangsung sampai tahun 2010. Namun begitu batasan tahun pada penelitian ini bukan merupakan suatu hal yang mutlak, tahun-tahun sebelum dan sesudahnya juga akan menjadi bagian dari kajian penelitian ini.

Kerangka dasar pemikiran diperlukan oleh penulis untuk membantu dalam menetapkan tujuan dan arah sebuah penelitian serta memiliki konsep yang tepat untuk pembentukan hipotesa. Teori bukan merupakan pengetahuan yang sudah pasti tapi merupakan petunjuk membuat sebuah hipotesis. Dalam melakukan penelitian ini, dibutuhkan adanya kerangka pemikiran yang menjadi pedoman peneliti dalam menemukan, menggambarkan dan menjelaskan objek penelitian sekaligus menjadi *frame* bagi peneliti.

Penulis menggunakan pendekatan realis yang mempunyai tema *Struggle for power and security*. Hubungan internasional ditandai dengan anarki, segala cara dilakukan untuk mencapai kepentingan nasional. Morgenthau menyatakan bahwa *super power* adalah fokus utama hubungan internasional, *power* adalah alat untuk mencapai kepentingan nasional (*national interest*).<sup>1</sup>

Asumsi kedua adalah dari pendekatan politik dan kewanitaan yaitu dengan cara menilai fungsi kekuasaan sebagai instrumen politik luar negeri. Asumsi ketiga adalah adanya hirarki yang jelas dari pokok-pokok permasalahan yang mendominasi politik internasional. Penelitian ini difokuskan pada kajian diplomasi dengan menggunakan teori analisa kebijakan luar negeri oleh Paul R. Viotti dan Mark V. Kauppi, teori-teori yang berhubungan dengan diplomasi dan juga power sebagai kekuatan nasional yang merupakan konsep pendukung dari suatu proses pelaksanaan diplomasi

---

<sup>1</sup> Hans Morgenthau. *Politics Among Nation: The Struggle for Power and Peace*. 1973. New York: Knopf. Hlm 25

Tingkat analisa yang digunakan adalah negara bangsa (*nation state*) dengan alasan bahwa objek utama dalam hubungan internasional adalah perilaku negara bangsa, dengan asumsi bahwa semua pembuat keputusan, dimanapun berada, pada dasarnya berperilaku sama apabila menghadapi situasi yang sama. Tingkat analisa bangsa dipakai dalam menjelaskan kebijakan yang sudah tercipta yang mewakili sebuah negara. Tingkat analisa ini mempercayai bahwa negara adalah aktor dominan dan yang paling kuat dalam percaturan interaksi kehidupan dunia. Negara relatif bebas untuk menentukan kebijakan apa yang harus diikuti.<sup>2</sup> Maka dari itu Amerika Serikat sebagai sebuah negara yang demokratis memperlihatkan kemampuan dan hasil dari kegiatan itu.

Analisa manuver diplomatik dan tindakan-tindakan diplomatik negara lain dapat dilihat sebagai akibat dari tekanan-tekanan politik, ideologi, opini publik atau kebutuhan ekonomi dan sosial dalam negeri.<sup>3</sup> Kondisi dalam negeri menentukan kebijakan luar negeri yang akan dicapai melalui jalur diplomasi. Menggunakan tingkat analisa negara bangsa dengan menitikberatkan pembahasan pada kebijakan luar negeri Amerika Serikat menghadapi Gerakan Khmer Rouge di wilayah Asia Tenggara.

Level analisa berasal dari anggapan bahwa perilaku setiap negara sebenarnya bergantung pada perilaku negara lainnya dalam sebuah sistem internasional. Untuk menerangkan sistem yang abstrak ini bisa dipakai analogi yang lebih sederhana yaitu sistem sirkulasi tubuh manusia, yang terdiri dari nadi, arteri, organ dan sel - sel yang secara keseluruhan harus bekerja dan berfungsi secara baik untuk kelancaran dalam sistem dan akhirnya menghasilkan tubuh yang sehat dan performa yang baik. Demikian juga dunia internasional, ia juga memiliki sub sistem yang saling berkaitan satu sama lain.<sup>4</sup>

Penelitian ini menggunakan konsep kepentingan nasional dalam perspektif politik strategi keamanan. Mengutip pemikiran dari realis yang mengatakan bahwa strategi diplomasi harus didasarkan pada kepentingan nasional, bukan pada alasan-alasan moral, legal dan ideologi yang dianggapnya utopis dan bahkan berbahaya.<sup>5</sup> Maka setiap negara harus mampu menyusun strategi yang jitu untuk mencapai kepentingan nasionalnya.

Donald E. Nuchterlain mengemukakan kepentingan sebagai kebutuhan yang dirasakan oleh suatu negara dalam hubungannya dengan negara lain yang merupakan lingkungan eksternalnya.<sup>6</sup> Kepentingan nasional inilah yang memberikan kontribusi

---

<sup>2</sup> Theodore A. Coloumbis & James E Wolfe, *Pengantar Hubungan Internasional: Keadilan dan power*, Bandung: Putra Abardin, 1990, hal 127

<sup>3</sup> Mohtar Mas' oed. *Ilmu Hubungan Internasional dan Metodologi*. LP3ES, Yogyakarta. 1990. Hlm 45

<sup>4</sup> K J. Holsti. *Politik Internasional, Suatu Kerangka Analisis*. 1992. Bandung: Binacipta. Hlm. 16

<sup>5</sup> *Ibid.*, hlm 40

<sup>6</sup> Donald E. Nuchterlain. *National Interest A new Approach*, Orbis. Vol 23. No.1 (Spring). 1979, hlm 57

yang besar bagi pembentukan pandangan-pandangan keluar bagi suatu bangsa. Kepentingan nasional yang dirumuskan oleh Donald E. Nuchterlain terbagi atas empat poin, yaitu:

1. *Defense Interest*: Kepentingan untuk melindungi negara atau rakyat dari ancaman fisik dari negara lain atau perlindungan ancaman terhadap sistem suatu negara.
2. *Economic Interest*: Kepentingan ekonomi yang berupa tambahan nilai secara ekonomi dalam hubungannya dengan negara lain dimana hubungan perdagangan yang dilakukan dengan negara lain akan memberikan keuntungan.
3. *World Order Interest*: Kepentingan tata dunia dengan adanya jaminan pemeliharaan terhadap sistem politik dan ekonomi internasional dimana suatu negara dapat merasakan keamanan sehingga rakyat dan badan usahanya dapat beroperasi diluar batas negara dengan aman.
4. *Ideological Interest*: Kepentingan ideologi dengan perlindungan terhadap serangkaian nilai-nilai tertentu yang dapat dipercaya dan dapat dipegang masyarakat dari suatu negara yang berdaulat.<sup>7</sup>

Berdasarkan pendapat Donald E. Nuchterlain, maka kepentingan Amerika Serikat memberikan bantuan ekonomi dan militer kepada Kamboja tahun 2010-2012 terkait perkembangan gerakan terorisme Khmer Rouge dalam bentuk *Ideology Ideology Interest* dan *New World Order interest*. Berdasarkan kepentingan ideologi maka kepentingan Amerika Serikat adalah untuk mempertahankan perkembangan ideologi demokrasi di negara Kamboja yang memudahkan Amerika Serikat untuk melakukan hubungan perdagangan ekonomi. Selain itu jika dikaji dari kepentingan tata dunia baru maka kepentingan Amerika Serikat terhadap Kamboja adalah untuk membentuk tatanan dunia baru yang menjadikan demokrasi sebagai paham bersama untuk seluruh negara di dunia internasional

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori politik luar negeri. Secara umum, politik luar negeri (*foreign policy*) merupakan suatu perangkat formula nilai, sikap, arah serta sasaran untuk mempertahankan, mengamankan, dan memajukan kepentingan nasional di dalam percaturan dunia internasional.<sup>8</sup> Politik luar negeri pada dasarnya merupakan kebijakan suatu negara yang ditujukan kepada negara lain untuk mencapai suatu kepentingan tertentu. Secara umum, politik luar negeri (*foreign policy*) merupakan suatu perangkat formula, nilai, sikap dan arah serta

---

<sup>7</sup> *Ibid.*

<sup>8</sup> Anak Agung Banyu Perwira & Yanyan Mochamad Yani, *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*. Remaja Rosdakary, Bandung 2005 hal 35.

sasaran untuk mempertahankan, mengamankan, dan memajukan kepentingan nasional didalam percaturan dunia internasional.<sup>9</sup>

Politik luar negeri merupakan strategi atau rencana tindakan yang dibentuk oleh para pembuat keputusan suatu negara dalam menghadapi negara lain atau unit politik internasional lainnya, dan dikendalikan untuk mencapai tujuan nasional spesifik yang dituangkan dalam terminologi kepentingan nasional.<sup>10</sup> Dalam pembuatan kebijakan atau keputusan disini, para pembuat keputusan atau pemerintah tidak dengan begitu saja memutuskan. Setidaknya ada beberapa tahapan yang harus di lakukan oleh pemerintah dalam memutuskan suatu kebijakan luar negeri.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori Graham T. Allison mengenai tiga model kebijakan luar negeri. Menurut Graham T. Allison, ada tiga macam model analisis yang dapat digunakan untuk mengkaji pembuatan kebijakan luar negeri suatu negara.<sup>11</sup>

1. Model Aktor rasional, yaitu: Kebijakan luar negeri dibuat berdasarkan pertimbangan dan perhitungan aktor-aktor politik.
2. Proses Organisasi, yaitu: Kebijakan luar negeri dibuat berdasarkan proses alami (Sistematis) oleh para aktor pemerintah. Proses organisasi, dalam model ini, negara diasumsikan sebagai organisasi yang memiliki berbagai organ dengan fungsi berbeda, yang bekerja untuk mencapai tujuan bersama dari organisasi tersebut. Pada model proses organisasi ini, masalah yang muncul adalah bagaimana sebuah keputusan yang diambil berdasarkan standard *operating procedures* dalam pemerintahan cenderung diasumsikan *predictable* dan tetap sesuai pola aksi tertentu.
3. Politik Birokratik: Gabungan dari kedua model diatas. Proses hubungan luar negeri dibuat berdasarkan kerjasama antar elemen pemerintah dan kelompok kepentingan. Dalam proses ini, perumusan kebijakan luar negeri terjadi dengan adanya interaksi diantara pemerintah dan kaum swasta

Model Graham T. Allison tersebut, diperoleh kesimpulan bahwa dalam pembuatan kebijakan luar negeri suatu negara, unsur domestik, baik itu berupa nilai-nilai yang dianut pemimpin, kepentingan para birokrat, sampai pada cara pemimpin menganalisa situasi domestik sangat berpengaruh. Dalam model ini politik luar negeri dipandang sebagai akibat dari tindakan aktor rasional. Pembuatan keputusan luar negeri digambarkan sebagai suatu proses intelektual.

Dari teori Graham T. Allison, maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan Amerika Serikat merespon Gerakan Khmer Rouge didasarkan pada politik birokratik.

---

<sup>9</sup> Perwita dan Yani, *Pengantar Hubungan Internasional*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung 2005 hal 47

<sup>10</sup> Jack C. Plano. Roy Olton, "Kamus Hubungan Internasional" cetakan kedua , penerbit Putra A Bardin, cv 1999. hal 5-6

<sup>11</sup> Mochtar mas`oed, ilmu hubungan internasional"Disiplin dan Metodologi" edisi revisi hal 223

Kebijakan Amerika Serikat terhadap gerakan Khmer Rouge dapat dilihat dari peran politik birokratik didalam pemerintahan Amerika Serikat berupa pelatihan militer bersama, peningkatan kuantitas personil militer Amerika Serikat serta bantuan ekonomi di Kamboja. Hal ini tentu saja didasarkan dari pandangan pemerintah Amerika Serikat terhadap gerakan-gerakan terorisme yang mengancam kedaulatan Amerika Serikat, salah satunya adalah gerakan Khmer Rouge yang sejak awal tahun 1960 an telah berkembang dan didasarkan pada aliran komunisme.

### **Hasil dan Pembahasan**

Hubungan antara negara merupakan hubungan yang paling tua dalam studi hubungan internasional dimana, hubungan internasional telah memunculkan aktor-aktor baru selain negara dalam interaksi internasional. Perkembangan ini berakibat pada lahirnya paradigma atau paham baru oleh para penstudi Hubungan Internasional dalam mengkaji fenomena-fenomena internasional yang terjadi. Paham tersebut antara lain paham realism, pluralism, strukturalisme, dan globalisme.

Dominasi aktor negara pada awal perkembangan Hubungan Internasional menurut kaum realis di gugat oleh kaum pluralis dan menganggap bahwa actor dalam HI tidak hanya di dominasi oleh negara tetapi juga di lakukan oleh MNC , individu , NGO, serta kelompok teroris. Sementara pendekatan strukturalisme lebih memandang interaksi hubungan internasional sebagai ketergantungan negara kecil terhadap negara besar dan dominasi negara kuat terhadap negara lemah.<sup>12</sup>Adanya faktor tunggal dalam Hubungan Internasional pada awal perkembangannya membuat tata hubungan internasional pada saat itu hanya diwarnai oleh interaksi antar negara saja. Dominasi peran antar negara tersebut kemudian menjadikannya sebagai aktor utama dalam Hubungan Internasional dan tatanan internasional terbentuknya sesuai dengan keinginan negara, khususnya negara besar.

Sifat-sifat penguasa di negara-negara tertentu yang represif dan cenderung otoriter, melahirkan rasa kekecewaan bagi rakyatnya karena keinginan untuk turut berpartisipasi dalam bidang politik tidak dapat tersalurkan bahkan cenderung di kekang. Ketika jalur-jalur penyampaian aspirasi politik tidak berjalan baik, maka partisipasi tersebut kemudian diwujudkan melalui gerakan-gerakan radikal yang pada akhirnya akan melahirkan kekerasan-kekerasan sipil.

Kekerasan sipil mencakup suatu spektrum yang sangat luas, mulai dari unjuk rasa, atau protes dengan menggunakan kekerasan, pemberontakan spontan, pemberontakan berencana dan berlanjut, kudeta bahkan sampai ke revolusi. Perang Saudara termasuk kekerasan politik sementara perang antar negara tidak.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Suwardi Wiraatmaja, *Pengantar Hubungan Internasional*, 1996 , Rafika Adikarya Bandung hal 13

<sup>13</sup> Philips Jusario Vermonte, di terjemahkan oleh Nasution, *Politik dan Kekerasan*, Pustaka Gramedia Jakarta 1990 hal 34

Kekerasan sipil berbentuk terorisme dapat dilakukan oleh penguasa atau negara terhadap rakyatnya sendiri atau terorisme negara, maupun oleh rakyat terhadap penguasanya. Terorisme digunakan sebagai senjata bertahan maupun menyerang untuk memelihara status quo atau untuk merusak sistem yang ada. Setelah berakhirnya Perang Dingin, berbagai kekerasan sipil termasuk terorisme internasional tampak semakin menjadi-jadi. Perang Saudara, terorisme dalam berbagai bentuk, pemberontakan, pemboman, peracunan, pembantaian, penyanderaan, demonstrasi berdarah dan sebagainya memenuhi media cetak maupun elektronik.

Amerika Serikat sebagai salah satu negara korban terorisme internasional, seperti yang diketahui bahwa Amerika merupakan negara *Adi Kuasa* yang terkadang memenuhi standar ganda dalam melihat suatu fenomena atau dalam menjalankan kebijakan-kebijakannya bila berkaitan dengan isu Arab Israel, menjadikannya objek kemarahan dari pihak-pihak yang dianggap dirugikan ataupun tidak senang dengan kebijakan standar ganda tersebut. Hal tersebut membuat Amerika Serikat menjadi sasaran terorisme internasional.

Terdapat banyak serangan terorisme yang dilakukan ke tempat-tempat kepentingan Amerika Serikat, baik itu di dalam dan di luar negeri, mulai dari aksi pemboman terhadap sebuah hotel di Yaman yang banyak dihuni oleh warga Amerika Serikat (1992), gedung World Trade Center New York (1993). Kampung Militer di Riyadh Arab Saudi (1993) basis militer Amerika Serikat di Dahrn Arab Saudi (1996). Kedutaan Besar Amerika Serikat di Kenya Tanzania (1998), kapal perang AS USS Cole di Yaman (2000) dan yang terakhir dan sangat berdampak terhadap bangsa dan negara Amerika Serikat yakni serangan terhadap World Trade Center dan Pentagon dengan menggunakan pesawat terbang komersil yang menjadi *tragedy nasional* bagi bangsa dan negara Amerika Serikat.<sup>14</sup>

Trauma yang sangat mendalam sebagai akibat aksi dari serangan-serangan terorisme tersebut membuat Amerika Serikat sangat reaktif dalam sikapnya menghadapi isu terorisme yang berkembang saat ini. Amerika Serikat sangat cepat merespon terhadap setiap isu terorisme. Hal ini tercermin dari kebijakan-kebijakan politik luar negerinya yang berusaha mencari simpati dunia internasional dalam kampanye pemberantasan jaringan terorisme. Hal ini sejalan dengan pendapat William D.Coplin bahwa : “Politik luar negeri suatu negara merupakan substansi dari hubungan internasional terselenggara sebagai sarana interaksi antar negara demi pencapaian tujuan nasional.”<sup>15</sup>

Sebelum mengadakan serangkaian tindakan dalam hubungan luar negerinya, suatu negara terlebih dahulu harus menentukan pola politik luar negerinya berdasarkan atas kebutuhan nasional sehingga kepentingan nasional berperan sebagai kontrol dalam setiap pelaksanaan politik luar negerinya. Di sini, tujuan nasional

---

<sup>14</sup> Kusnanto Anggoro, *Terorisme Terhadap Amerika*, Jurnal CSIS Vol.36.No.1 2007

<sup>15</sup> William D Coplin, *Pengantar Politik Internasional* , Bandung : Pustaka Bersama 1992 hal 32

Amerika adalah berusaha melindungi seluruh warga dan kepentingan di dalam dan di luar negeri sedangkan instrument yang digunakan adalah cenderung kepada politik. Menciptakan rasa aman bagi warganya dinilai sebagai kebutuhan yang mendesak, mengingat warga dan kepentingannya tersebar ke seluruh belahan dunia.

Isu terorisme, ternyata bukan hanya konsumsi wilayah regional tertentu saja seperti Timur Tengah, namun telah menyebar ke wilayah-wilayah regional lainnya yang memiliki potensi konflik dan instabilitas seperti halnya kawasan regional Asia Tenggara. Konflik intern di negara kawasan tersebut, bisa saja memancing jaringan internasional untuk melakukan aksi-aksi teror di kawasan tersebut. Sebagai contoh aksi terror yang di lakukan oleh kelompok Khmer Rouge di Kamboja dan gerilyawan Moro di Philipina Selatan. Pada perkembangannya dinilai dapat membahayakan keselamatan warga dan kepentingan Amerika Serikat di kawasan Asia Tenggara.<sup>16</sup>

Wilayah Asia Tenggara memiliki dimensi yang unik dalam perkembangan kelompok terorisme. Hal ini bisa dilihat dari perkembangan kelompok terorisme lokal seperti di Kamboja yang dikenal dengan kelompok Khmer Rouge. Selepas kesatuan Soviet tahun 1950, paham anti kolonialisme banyak menarik pemuda Kamboja seperti Pol Pot untuk membuat gerakan dan partai yang anti terhadap kolonialisme.<sup>17</sup>

Pol pot merupakan pemimpin gerakan Khmer Rouge yang bertujuan untuk menumbuhkan kembali gerakan komunisme di negara Kamboja. Beberapa hal yang dilakukan gerakan Khmer Rouge adalah pembunuhan massal atau *genocide* yang telah dilakukannya sejak tahun 1953. Walaupun saat ini gerakan Khmer Rouge sudah tidak terlaksana secara besar-besaran seperti di negara Filipina dan Malaysia. Namun Amerika Serikat masih menjadikan Gerakan Khmer Rouge sebagai gerakan politik yang patut diwaspadai. Hal ini dikarenakan Gerakan Khmer Rouge merupakan salah satu gerakan yang anti terhadap Amerika Serikat.

Munculnya kembali gerakan Khmer Rouge dalam arena perpolitikan di Kamboja memiliki tujuan untuk kembali mengubah sistem politik Kamboja yang saat ini menganut sistem demokrasi menjadi sistem komunisme. Hal ini tentu saja mengganggu kepentingan Amerika Serikat di wilayah Asia Tenggara pada umumnya dan Kamboja pada khususnya. Negara-negara wilayah Asia Tenggara sebagian besar merupakan sekutu Amerika Serikat dalam bidang perdagangan dan bisnis internasional. Sehingga dengan adanya gerakan Khmer Rouge yang berideologi komunisme tentu saja mengancam kepentingan ekonomi dan penanaman ideologi demokrasi Amerika Serikat di wilayah Asia Tenggara.

Mabus juga mengatakan bahwa latihan gabungan antara Angkatan Laut Amerika Serikat dan Kamboja telah membantu membangun profesionalisme dan kapasitas bagi kedua pihak dan Mabus menambahkan bahwa dalam beberapa tahun

---

<sup>16</sup> Kedutaan Besar Amerika Serikat untuk Indonesia, Diplomatic Year Book, 1994, Washington DC. Hal 14-15.

<sup>17</sup> Rikard Bagun, "Kamboja di Peta Terorisme Global", 17 November 2002

ke depan, sekitar 60 persen dari armada Amerika Serikat akan dikerahkan di Asia-Pasifik dan jumlah kapal angkatan laut Amerika Serikat di Asia-Pasifik akan menjadi setidaknya 300 kapal. Sehingga, Amerika Serikat dan Kamboja akan memiliki lebih banyak kesempatan untuk bekerja sama dalam melawan terorisme dan bentuk-bentuk lain pelanggaran maritim.<sup>18</sup>

Wilayah Asia Tenggara memiliki dimensi yang unik dalam perkembangan kelompok terorisme. Hal ini bisa dilihat dari perkembangan kelompok terorisme lokal seperti di Kamboja yang dikenal dengan kelompok Khmer Rouge. Selepas kesatuan Soviet tahun 1950, paham anti kolonialisme banyak menarik pemuda Kamboja seperti Pol Pot untuk membuat gerakan dan partai yang anti terhadap kolonialisme.<sup>19</sup>

Pol pot merupakan pemimpin gerakan Khmer Rouge yang bertujuan untuk menumbuhkan kembali gerakan komunisme di negara Kamboja. Beberapa hal yang dilakukan gerakan Khmer Rouge adalah pembunuhan massal atau *genocide* yang telah dilakukannya sejak tahun 1953. Walaupun saat ini gerakan Khmer Rouge sudah tidak terlaksana secara besar-besaran seperti di negara Filipina dan Malaysia. Namun Amerika Serikat masih menjadikan Gerakan Khmer Rouge sebagai gerakan politik yang patut diwaspadai. Hal ini dikarenakan Gerakan Khmer Rouge merupakan salah satu gerakan yang anti terhadap Amerika Serikat.

Munculnya kembali gerakan Khmer Rouge dalam arena perpolitikan di Kamboja memiliki tujuan untuk kembali mengubah sistem politik Kamboja yang saat ini menganut sistem demokrasi menjadi sistem komunisme. Hal ini tentu saja mengganggu kepentingan Amerika Serikat di wilayah Asia Tenggara pada umumnya dan Kamboja pada khususnya. Negara-negara wilayah Asia Tenggara sebagian besar merupakan sekutu Amerika Serikat dalam bidang perdagangan dan bisnis internasional. Sehingga dengan adanya gerakan Khmer Rouge yang berideologi komunisme tentu saja mengancam kepentingan ekonomi dan penanaman ideologi demokrasi Amerika Serikat di wilayah Asia Tenggara.

Contoh-contoh gerakan transnasional terorisme atau terorisme internasional antara lain I.R.A yang menyerang London, Bakkunist Anarchist International yang aktif di Eropa pada 1870-an, gerakan Japanese United Army (JPR) yang mempunyai tujuan menciptakan “world revolution”, juga yang terjadi di Taliban dengan Al-Qaidah yang menyerang gedung WTC dan Pentagon di AS.

Tindakan terorisme juga dapat dikatakan internasional jika ia secara diam-diam berkolaborasi atau beraliansi sesama teroris dan pemerintah, serta dengan gerakan terorime di negara lain. Singkatnya, terorisme menjadi internasional dengan beberapa tindakan atau yang mendukungnya, antara lain sebagai berikut:

1. Secara langsung di luar negeri atau dengan target luar negeri.

---

<sup>18</sup> Diakses dari <http://www.Antara/Xinhua-OANA.com>. Oleh Ruslan Burhani. *Kerjasama militer AS dan Kamboja*. Pada tanggal 15 Agustus 2012

<sup>19</sup> Rikard Bagun, “Kamboja di Peta Terorisme Global”, 17 November 2002

2. Diselenggarakan oleh pemerintah atau faksi lebih dari satu Negara.
3. Juga mempunyai tujuan untuk mempengaruhi kebijakan negara-negara lain.<sup>20</sup>

Asia Tenggara semakin mendapat sorotan dunia internasional lantaran sejumlah peristiwa teror yang terjadi secara bertubi-tubi. Korban dalam jumlah besar dan target serangan yang merupakan simbol-simbol Barat merupakan persamaan dari serentetan teror yang terjadi di Indonesia, negara yang terletak di kawasan Asia Tenggara.

Pelaku teror ditengarai suatu kelompok yang memiliki hubungan dengan Al Qaeda (AQ) di Afghanistan, bernama Jemaah Islamiyah. Padahal AQ diindikasikan sebagai kelompok yang bertanggungjawab atas teror 11 November 2001 di Amerika Serikat. Teror memang bukan hal baru di Asia Tenggara, sebab ada beberapa kelompok pemberontak yang kerap menggunakan kekerasan sehingga menyebarkan ketakutan di masyarakat. Berikut ini adalah beberapa kelompok pemberontak dan teroris yang ada di Asia Tenggara.

#### **Kelompok Terorisme di Kamboja**

No.	Kelompok Teroris	Negara	Tujuan	Kegiatan	Status
1	Cambodian Freedom Fighters (CFF)	Kamboja	Politik lokal		
2.	Khmer Rouge	Kamboja	Politik lokal		

Sumber: Rohan Gunaratna, 2006. *Terroris in Southeast Asia : Threat and Response*. [http://counterterrorismblog.org/siteresources/image/Gunaratna\\_Terrorism-in\\_Southeast/Asia-Threat\\_and\\_Response.pdf](http://counterterrorismblog.org/siteresources/image/Gunaratna_Terrorism-in_Southeast/Asia-Threat_and_Response.pdf)

The Paris International Conference on Cambodia pada tahun 1991 yang menandai berakhirnya konflik Kamboja. Secara garis besar pembahasan dalam penyelesaian masalah Kamboja ini dibagi kedalam empat bagian yakni faktor-faktor yang menjadi akar konflik di Kamboja, konflik Kamboja sebagai konflik internal yang akan memberikan gambaran akan latar belakang konflik sejak awal mula terjadinya pergolakan di dalam negeri sehingga Kamboja terjerumus ke dalam konflik internal hingga akhirnya klimaks dari konflik ditandai dengan intervensi Vietnam ke Kamboja yang mengundang reaksi keras dari negara-negara di kawasan serta komunitas internasional.

Internasionalisasi konflik Kamboja yang akan menjelaskan bagaimana fase konflik memasuki tahap internasionalisasi di mana pendudukan rezim Vietnam di Kamboja tidak hanya mengganggu stabilitas keamanan di kawasan, namun juga

<sup>20</sup> <http://dewitri.wordpress.com/2008/02/01/teroris-sebagai-non-state-actor-baru-dalam-hubungan-internasional/> Diakses tanggal 10 Juni 2011

menentang norma-norma dan hukum internasional yang berlaku sehingga mengganggu perdamaian dunia, proses penyelesaian konflik Kamboja melalui fase dialog dan mediasi terhitung sejak digelarnya Jakarta Informal Meeting di Indonesia pada tahun 1988.<sup>21</sup>

Pasca invasi rezim Vietnam yang mendirikan pemerintahannya melalui People's Republic of Kampuchea (PRK) maka spontan hal ini mendapatkan reaksi yang keras dari komunitas internasional. Hal yang menjadi esensi dalam perkembangan konflik di Kamboja ini yaitu kendati dunia telah mengutuk tindakan yang dilakukan oleh DK melalui perbuatan ketidakmanusiannya, namun intervensi kekuatan asing melalui menggunakan kekuatan militernya untuk menjatuhkan rezim yang tengah menjadi sorotan dunia tersebut tetap tidak dapat dibenarkan.

Konflik di Kamboja selanjutnya memasuki tahap internasionalisasi yang intensif, di mana tahun-tahun berikutnya perkembangan konflik diwarnai dengan pergolakan di dalam negeri melalui pihak-pihak oposisi yang masing-masing berupaya untuk mengumpulkan kekuatan demi menjatuhkan pemerintahan PRK yang tak lain merupakan kepanjangan tangan Vietnam di Kamboja.

Secara teoritis, perubahan mendasar yang terjadi dalam sistem internasional terjadi ketika aktor negara-negara besar melalui politik luar negeri yang di jalankannya, mengubah aturan dan norma-norma dalam interaksi internasional mereka. Pola hubungan diplomatik antar negara dengan demikian, tidak saja mempengaruhi hierarki dan stuktur aktor tetapi akan memunculkan pula tingkat yang berbeda dalam tindakan (*outcomes*) politik luar negerinya.

Kendati Amerika Serikat kini muncul sebagai satu-satunya negara adikuasa, namun para pengambil keputusan politik luar negeri Amerika Serikat merasa perlu untuk terus menerus menyesuaikan agenda politik luar negerinya sesuai dengan perubahan sistemik dan situasional yang terjadi di lingkungan eksternal dan internalnya.

Dalam kebijakan luar negeri Amerika Serikat mencerminkan pandangan Amerika Serikat sebagai negara adikuasa tunggal di dunia yang saling membutuhkan dan bergantung dengan negara-negara lain. Hal ini dapat dilihat dalam berbagai hubungan kerjasama Amerika Serikat dengan berbagai negara di dunia dalam rangka mencapai berbagai tujuan dan kepentingan Amerika Serikat.<sup>22</sup>

Terdapat 3 (tiga) kemungkinan bagi Amerika Serikat untuk memainkan peranannya di Asia Tenggara. *Pertama*, menciptakan stabilitas sambil menguasai dan membawa Asia Tenggara dalam pengaruh Amerika Serikat. Yang *kedua*, ikut menstabilkan wilayah tersebut secara bersama-sama dengan bangsa-bangsa Asia

---

<sup>21</sup> Diakses dari <http://www.konflik.kamboja.com>. oleh Ivan Sijatmoko. Pada tanggal 23 Januari 2013

<sup>22</sup> Baylis John and Smith Steven. 2001. *The Globalization of World Politics*, the 3th edition: An Introduction to International Relations. New York: Oxford University Press.

Tenggara sambil mengimbangi pengaruh-pengaruh komunis yang ingin mempengaruhi kawasan tersebut. Dan yang *ketiga* seperti yang diinginkan oleh bangsa-bangsa ASEAN agar Asia Tenggara menjadi negara yang aman, damai, bebas, dan netral.<sup>23</sup>

Secara umum, kebijakan politik luar negeri Amerika Serikat dalam menghadapi terorisme di kawasan Asia Tenggara adalah sebagai berikut :

1. Mengeluarkan kebijakan *Travel Advisory* dan *Travel Warning* terhadap negara-negara di Kawasan Asia Tenggara yang memiliki potensi menjadi target serangan teroris seperti Kamboja, Filipina, Malaysia, Singapura, dan Indonesia bagi warga Negara Amerika Serikat yang akan bepergian ke luar negeri terutama lagi pasca serangan bom Bali di Indonesia.
2. Meningkatkan kuantitas jumlah personil Amerika Serikat di kawasan Asia Tenggara. Dari jumlah 82.000 personil militer ditingkatkan menjadi 100.000 personil militer Amerika Serikat yang bertugas di seluruh kawasan Asia karena pemerintah Amerika Serikat menilai bahwa di kawasan Asia Tenggara terdapat negara-negara sponsor terorisme dan negara-negara yang dinilai mempunyai gerakan fundamental/militan yang agresif terhadap kemungkinan serangan aksi terorisme. Pemerintah Amerika Serikat juga memprakarsai pertemuan 22 Komandan Militer se Asia Pasifik di Singapura.
3. Menggiatkan kampanye Anti Terorisme melalui forum-forum kerjasama regional/internasional seperti APEC (dimana sebagian besar negara-negara kawasan Asia Tenggara menjadi anggotanya) yang melahirkan pernyataan bersama pemimpin Negara anggota APEC yakni tertuang dalam *Statement on Recent Acts of Terrorism in APEC Member Economics* dan *APEC leader Statement on Fighting Terrorism and Promoting Growth*.
4. Selanjutnya, dengan ASEAN, pemerintah AS membuat kesepakatan anti terorisme, dalam *ASEAN-US Join Declaration for Cooperation to Combat International Terrorism* yang akan merupakan kerjasama antara Amerika Serikat dengan 10 negara anggota ASEAN mengenai pertukaran informasi intelijen, kerjasama teknis dan upaya bersama menghentikan sumber keuangan jaringan terorisme internasional.

Secara khusus, pemerintah Amerika Serikat juga mengeluarkan kebijakan yang bersifat bilateral di kawasan Asia Tenggara, yakni:

1. Dengan Kamboja yaitu, pemerintah Amerika Serikat akan membentuk pusat koordinasi anti terorisme regional Asia Tenggara di Kamboja. Dimana Kamboja bersama-sama dengan Amerika Serikat akan menjadi kordinator untuk semua aktifitas untuk mencegah aksi terorisme di kawasan tersebut. Hal itu merupakan rangkaian penghargaan pemerintah Amerika Serikat terhadap

---

<sup>23</sup> Kedutaan Besar Amerika Serikat untuk Indonesia, *Diplomatic Year Book*, 1994, Washington DC. Hal 14-15.

Kamboja atas kerjasama kedua negara memerangi terorisme. Kemudian secara bilateral, kedua negara juga menandatangani kesepakatan anti terorisme ketika kedua pemimpin negara tersebut bertemu di Amerika Serikat pada tanggal 22 Mei 2002.

Peristiwa genosida di Kamboja telah membawa makna tersendiri bagi masyarakat akan bahaya perkembangan teror-teror dalam entitas masyarakat sipil di Kamboja. Tragedi yang memiliki dampak sangat besar serta membawa trauma yang mendalam bagi pemerintah Kamboja dan masyarakat dalam melihat perkembangan-perkembangan tindakan terorisme.

Dalam menangani aksi teroris itu, Kamboja perlu meyakinkan masyarakatnya bahwa ancaman teroris sudah mencapai tahap yang sangat membahayakan. Oleh karena itu Kamboja melakukan langkah pro aktif untuk memerangi aksi teror tersebut. Sedangkan dalam kebijakan politik luar negeri Indonesia harus menunjukkan keseriusan dan konsistensinya dalam melakukan kerjasama bilateral, regional maupun multilateral untuk memerangi bahaya atau ancaman terorisme global.

Sejak insiden tersebut, Kamboja cenderung dituding sebagai wilayah bagi kegiatan kelompok komunisme dan jaringan Al-Qaeda dengan jaringannya Jamaah Islamiyah. Para ahli mengatakan bahwa serangan-serangan teroris di Kamboja, termasuk pengeboman dan pembunuhan massal berkaitan dengan kegiatan terorisme internasional. Mengenai tuduhan bahwa Kamboja menjadi tempat bagi kegiatan komunisme dan Al-Qaeda, Menteri Pertahanan Kamboja pernah menggarisbawahi bahwa kegiatan tersebut memang eksis di Kamboja.

Sebelumnya, Kepala Badan Intelijen Negara juga pernah menyebutkan bahwa teroris asing pernah berlatih di Kamboja. Meskipun demikian, Kamboja harus lebih berhati-hati dalam menanggapi pernyataan beberapa negara Barat itu. Pada intinya Kamboja dan Amerika Serikat sepakat dengan tegas untuk memerangi aksi terorisme internasional. Dalam kerangka kerjasama anti terorisme, pihak Administrasi Amerika Serikat merencanakan akan mengajukan anggaran sebesar US\$ 14 juta untuk Indonesia tahun 2005. Kerjasama ini lebih diarahkan kepada pihak Kepolisian.

Oleh karena itu, beberapa kebijakan Amerika Serikat menghadapi perkembangan gerakan Khmer Rouge di Kamboja adalah sebagai berikut:

1. Kebijakan Amerika Serikat Memberikan Bantuan Militer kepada Kamboja
2. Amerika Serikat Melakukan Kerjasama Latihan Militer dengan Kamboja
3. Amerika Serikat Meningkatkan Jumlah Personil Militer di Kamboja

### **Kesimpulan**

Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa Motivasi Amerika Serikat memberikan bantuan ekonomi dan militer kepada Kamboja adalah karena kepentingan Amerika Serikat terhadap Kamboja untuk mempertahankan

sistem demokrasi dan mengantisipasi berkembangnya kembali Gerakan Khmer Rouge di Kamboja.

Dalam menghadapi terorisme, khususnya di Asia Tenggara, Pemerintah Amerika Serikat memilih untuk bersikap tegas, tidak melakukan kompromi, dan menolak secara tegas untuk melakukan negosiasi dengan kelompok terorisme, baik itu berupa tebusan, perubahan kebijakan, penukaran atau pembebasan tawanan. Pemerintah Amerika Serikat memberlakukan Undang-Undang baru yaitu *Patriot Act* 2001 yang berisi menentang terorisme dan berbagai kegiatan yang mendukungnya atau bersentuhan dengan aksi terorisme yang dilarang, seperti larangan pemberian bantuan dana pada jaringan terorisme.

Pemerintah Amerika Serikat mengeluarkan kebijakan politik luar negeri secara umum dalam menghadapi terorisme internasional di kawasan Asia Tenggara yakni, mengeluarkan Kebijakan *travel advisory* dan *travel warning* terhadap Negara-negara yang potensial mendapat serangan terorisme di Kawasan Asia Tenggara seperti Kamboja, Filipina dan Inodnesia.

Amerika Serikat juga meningkatkan kuantitas personil militer di kawasan Asia untuk melindungi kepentingan dan warga negaranya. Menggiatkan kampanye anti terorisme internasional melalui forum kerjasama regional seperti APEC dan ASEAN.

Kebijakan luar negeri secara khusus yang bersifat bilateral antara pemerintah Amerika Serikat dan beberapa negara di kawasan Asia Tenggara. Yaitu dengan Kamboja Amerika Serikat melakukan kerjasama pembentukan pusat koordinasi anti terorisme regional Asia Tenggara di Kamboja dan melakukan kerjasama latihan militer serta pemerintah Amerika Serikat memberikan bantuan dana sebesar 50 juta USD untuk membiayai pelatihan dan pembentukan satuan anti terror yang professional.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Anak Agung Banyu Perwira & Yanyan Mochamad Yani, 2005. *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*. Remaja Rosdakary, Bandung.
- Baylis John and Smith Steven. 2001. *The Globalization of World Politics*, the 3th edition: An Introduction to International Relations. New York: Oxford University Press.
- Donald E. 1979. Nucterlain. *National Interest A new Approach*, Orbis. Vol 23. No.1 (Spring).
- Fredrich Fukuyama. 1991. *The End of History*. Sage Publication.
- Hans Morgenthau. *Politics Among Nation: The Struggle for Power and Peace*. 1973. New York: Knopf.
- Jack C. Plano. Roy Olton, 1999. "Kamus Hubungan Internasional" cetakan kedua , penerbit Putra A Bardin,
- K J. Holsti. *Politik Internasional, Suatu Kerangka Analisis*. 1992. Bandung: Binacipta.
- Kedutaan Besar Amerika Serikat untuk Indonesia, *Diplomatic Year Book*,1994, Washington DC.
- Mohtar Mas'ued. 1990. *Ilmu Hubungan Internasional dan Metodologi*. LP3ES, Yogyakarta.
- Philips Jusario Vermonte, di terjemahkan oleh Nasution, 1990. *Politik dan Kekerasan*, Pustaka Gramedia Jakarta.
- Suwardi Wiraatmaja, *Pengantar Hubungan Internasional*, 1996 , Rafika Adikarya Bandung
- Theodore A. Coloumbis & James E Wolfe, 1990. *Pengantar Hubungan Internasional: Keadilan dan power*, Bandung: Putra Abardin.
- William D Coplin, 1992. *Pengantar Politik Internasional* , Bandung : Pustaka Bersama

### Jurnal

- Kusnanto Anggoro, Terorisme Terhadap Amerika, *Jurnal CSIS* Vol.36.No.1 2007
- Rikard Bagun, "Kamboja di Peta Terorisme Global", 17 November 2002

### Website

- Diakses dari. <http://dewitri.wordpress.com/2008/02/01/teroris-sebagai-non-state-actor-baru-dalam-hubungan-internasional/> Diakses tanggal 10 Juni 2011
- Diakses dari.[http://www.Antara/ Xinhua-OANA.com](http://www.Antara/Xinhua-OANA.com). Oleh Djibril Muhammad. *Angkatan Laut Kamboja mempererat hubungan kerjasama dengan Amerika Serikat*. Pada tanggal 15 Juli 2012